

SKRIPSI

FAIZAL KURNIAWAN

**PERJANJIAN LISENSI MEREK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

PERJANJIAN LISENSI MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,


Rahmi Jened, S.H., M.H.
NIP. 131 923 881

Penyusun,


Faizal Kurniawan
NIM. 030115176

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 6 Oktober 2004**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.

Anggota : 1. Rahmi Jened, S.H., M.H.

2. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.

3. Hj. Mas Rahmah, S.H., M.Hum.

4. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian dan pembahasan mengenai perjanjian lisensi merek dalam perspektif hukum persaingan, adalah :

1. Pengaturan HKI maupun persaingan yang terkait dengan lisensi merek, di dalam UU No. 15/2001 diatur secara tegas dalam Bab V, Bagian Kedua, pasal 43 – 49 UU No. 15/2001, bahwa Lisensi berbeda dengan pengalihan hak. Lisensi adalah suatu izin keistimewaan pribadi untuk melakukan beberapa tindakan khusus, biasanya dapat ditarik kembali atas kemauan pemberi lisensi dan bukan merupakan pengalihan hak.

Dalam UU No. 5/1999 terdapat dalam Bab IX, pasal 50 sub (b) UU No. 5/1999, bahwa perjanjian lisensi merek dikategorikan kedalam perjanjian yang dikecualikan dari berlakunya semua ketentuan yang terdapat dalam UU No. 5/1999.

2. Bentuk perjanjian lisensi merek yang dapat dikategorikan melanggar persaingan adalah apabila perjanjian lisensi tersebut tidak semata-mata murni perjanjian HKI. Perjanjian tersebut kemungkinan mempunyai muatan-muatan yang bersifat penyalahgunaan (*abuse*) hak atas merek seperti :

Penetapan Harga Jual (*fix pricing*), *Eksklusivitas*, *Tie-in Restriction*, *Exclusive Dealing Restriction* dan *Granting Back Provision*.

2. Saran

Saran-saran yang mungkin berguna bagi kita semua diantaranya adalah :

1. Secara internasional, posisi UU No. 5/1999 kurang menguntungkan ketika masyarakat internasional mulai curiga adanya kemungkinan efek negatif dari praktik-praktik perlisensian di bidang HKI terhadap persaingan, UU No. 5/1999 bersikap sebaliknya. Pasal 40 ayat (1) perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) menyatakan bahwa negara-negara anggota WTO bersepakat bahwa sebagian praktik perlisensian dapat menghambat persaingan sehingga dapat menghambat perdagangan dan alih teknologi dan pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa negara-negara anggota dapat menetapkan dalam peraturan perundang-undangnya praktik-praktik dan syarat-syarat perlisensian yang merupakan penyalahgunaan HKI sehingga menghambat persaingan. Walaupun kesepakatan internasional tersebut belum menunjuk praktik-praktik perlisensian yang bagaimana yang menghambat persaingan, namun pembuat UU No. 5/1999 dapat menandakan adanya pendapat internasional bahwa perjanjian di bidang

penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

